



**Laporan Kinerja Triwulan 2  
BPMP Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Kepulauan Riau selama triwulan 2 tahun 2025.

**A. Progress Capaian Kinerja**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
<b>[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen</b>				
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	64,06	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	57,61	Persen	0	0
<b>[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kepulauan Riau</b>				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Riau dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kepulauan Riau minimal A	A	Predikat	-	-

**B. Analisis Hasil Capaian Kinerja**

**[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen**

**[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran**

**Progress/Kegiatan**

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung oleh KRO Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (DI.7605.QDB) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.448.549.563 (17,23%) dari pagu anggaran Rp 8.406.687.000 (termasuk pagu blokir Rp 5.278.016.000). Capaian Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran dengan target 64,06% masih belum dapat dihitung realisasinya, dikarenakan belum ada data yang akan dijadikan dasar perhitungan. Akan tetapi sudah dilakukan beberapa kegiatan pendukung dari RO Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya (DI.7605.QDB.750) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.448.549.563 (17,23%) dari pagu anggaran Rp 8.406.687.000 (termasuk pagu blokir Rp 5.278.016.000).



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



Dengan rincian kegiatan dari komponen:

1. Pelaksanaan Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah (DI.7605.QDB.750.093) melalui kegiatan sebagai berikut:
  1. Subkomponen (QA) Advokasi kebijakan Dana Tranfer Daerah dengan 100% pelaksanaan dengan 1 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi dan Supervisi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen Periode Juni 2025, di Harris Hotel Batam Center pada tanggal 24 s.d. 26 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Disdukcapil, Inspektorat Daerah, Perwakilan Camat, MKPS, Dewan Pendidikan, Biro Kesra, PWI, Perwakilan Sekolah Penerima Manfaat MBG, dan SDM BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Peningkatan pemahaman stakeholder terkait program prioritas Kemendikdasmen, khususnya SPMB, Wajar 13 tahun, Revitalisasi Sekolah, dan G7KAIH dan Penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan SPMB. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pelayanan pendidikan di wilayah Kepulauan Riau.
  2. Subkomponen (QB) Pendampingan penatausahaan Dana Transfer Daerah dengan 100% pelaksanaan dengan 2 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
    1. Rapat Evaluasi Capaian Realisasi Dana BOS Semester I (Satu) Tahun 2025, di Auditorium SMAN 3 Batam pada tanggal 4 Juli 2025 dengan sasaran kegiatan Satuan Pendidikan Penerima BOSP jenjang Dikmen. Output dari kegiatan ini adalah Tersampakkannya permasalahan pelaporan BOSP pada satuan pendidikan penerima BOSP. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya progres pelaporan BOSP diatas 50% pada satuan pendidikan jenjang Dikmen, sehingga dapat tersalurkan BOSP pada tahap berikutnya.
    2. Pendampingan BOSP Lingga pada tanggal 8 s.d. 10 Juli 2025 dengan sasaran kegiatan Satuan Pendidikan Penerima BOP PAUD dan Kesetaraan di Kabupaten Lingga. Output dari kegiatan ini adalah Tersampakkannya kebijakan pengelolaan BOSP Tahun 2025. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan penerima BOSP dalam pengelolaan dana BOSP sesuai regulasi yang berlaku.
2. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (DI.7605.QDB.750.096) melalui kegiatan sebagai berikut:
  1. Subkomponen (HP) Melakukan tindak lanjut power map dengan 100% pelaksanaan 3 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
    1. Pendampingan Tim Evaluasi ZI WBK, di Kota Batam pada tanggal 7 s.d. 8 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Pegawai BPMP Provinsi Kepri. Output dari kegiatan ini adalah Laporan hasil evaluasi ZI WBK yang lengkap dan terperinci, yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan ke depan. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kesadaran dan komitmen terhadap pencegahan korupsi serta tata kelola pemerintahan yang bersih di sektor pendidikan.
    2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Konsolidasi Nasional Tahun 2025, di BPMP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 s.d. 12 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Seluruh Kepala BB/BPMP di Indonesia. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi terkait peran BBPMP/BPMP dalam mendampingi pelaksanaan program prioritas Kemendikdasmen. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah BB/BPMP dapat melakukan Advokasi dan pendampingan Implementasi Program Kebijakan Kemendikdasmen agar selaras dengan Kebijakan Pendidikan di Daerah, seperti melaksanakan kegiatan Pameran kecil yang menunjukkan bagaimana mengimplementasikan Kebijakan di tingkat satuan Pendidikan agar dapat disesuaikan dengan jenjang Satuan Pendidikan.
    3. Rapat Koordinasi (Rakor) PPID Tahun 2025 di Kemendikdasmen, di BBPPMPV Seni dan Budaya, di Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 14 s.d. 16 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan UPT Kemendikdasmen. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah terwujudnya nilai-nilai 'RAMAH' dan 'SANTUN' sebagai bagian dari Strategi Komunikasi untuk mendukung pencapaian peningkatan mutu pendidikan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

2. Subkomponen (HQ) Menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas dengan 100% pelaksanaan 2 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
  1. Workshop Tindak Lanjut Hasil Evaluasi TPI ZI/WBK Kemendikdasmen 2025 pada tanggal 7 s.d. 8 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Pegawai BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah adanya paparan RBI pada tahun 2025 dan terisinya LKE RBI yang terbarukan. Dampak dari kegiatan ini diharapkan meningkatnya nilai capaian kantor BPMP Prov Kepulauan Riau yang didapatkan oleh tim evalausi TPI ZI/WBK pada tahun 2025.
  2. Koordinasi Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Kemendikdasmen, di BBPMP Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 s.d. 3 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Tim Publikasi dan Komunikasi Unit Kerja dan UPT di Lingkungan Kemendikdasmen. Output dari kegiatan ini adalah Peningkatan interaksi di media sosial yang terlibat dalam penyebaran informasi kebijakan pendidikan. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Peningkatan kualitas komunikasi dan interaksi antara Kemendikdasmen dengan masyarakat, terutama dengan orang tua, guru, dan siswa.
3. Subkomponen (ZC) Pembelajaran Mendalam dengan 100% pelaksanaan yang dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Kerja (Raker) dan In House Training (IHT) MTsN 3 Kota Batam Tahun Pelajaran 2025/2026, di MTsN 3 Kota Batam pada tanggal 23 s.d. 25 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Kepala Sekolah dan Guru di MTsN 3 Batam, sedangkan pegawai BPMP Provinsi Kepulauan Riau diundang sebagai Narasumber. Output dari kegiatan ini adalah tersampaikannya kebijakan Kurikulum Merdeka, Kurikulum Berbasis Cinta, dan Pembelajaran Mendalam. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman guru terhadap Kurikulum Merdeka, Kurikulum Berbasis Cinta, dan Pembelajaran Mendalam.
4. Subkomponen (ZG) Penanaman 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dengan 100% pelaksanaan 3 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
  1. Apresiasi Pemenang Lomba Semarak Hardiknas Tahun 2025 Tingkat Nasional, di Taman Mini Indonesia (Anjungan Sumatera Barat) Jakarta pada tanggal 26 s.d. 27 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Apresiasi kepada satuan pendidikan dan UPT PAUD Dasmen yang telah menukseskan Semarak Hardiknas. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan terkait pendidikan karakter (7 KAIH). Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah terimplementasinya 7 KAIH.
  2. Deklarasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH), di Halaman Pollux Mall Batam, Kota Batam pada tanggal 28 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Tersosialisasinya 7 KAIH. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan terkait pendidikan karakter (7 KAIH). Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Terimplementasinya 7 KAIH.
  3. Pemantauan Implementasi dan Edukasi Gizi Program Makan Bergizi Gratis Jenjang Sekolah Dasar, di Kota Tanjungpinang pada tanggal 18 s.d. 20 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, SD Negeri 011 Bukit Bestari, dan SD 002 Bukit Bestari. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan Implementasi dan Edukasi Gizi Program Makan Bergizi Gratis Jenjang Sekolah Dasar, di Kota Tanjungpinang. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kehadiran jumlah dan tumbuh kembang ideal sesuai usia bagi para siswa.
5. Subkomponen (ZH) Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan 100% pelaksanaan 1 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Optimalisasi Sinergitas dan Dukungan Pelaksanaan MBG pada Satuan Pendidikan di Kota Batam, di Kota Batam pada tanggal 7 s.d. 8 April 2025 dengan sasaran kegiatan Sekolah jenjang SMP kota Batam. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penjaringan data tata kelola UKS dan ekstrakurikuler. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Terpetakan data tata kelola UKS di kota Batam.
6. Subkomponen (ZK) Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan 100% pelaksanaan 1 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Penjaringan Data Tata Kelola UKS di Satuan Pendidikan Jenjang SMP, di Kota Batam pada tanggal 10 s.d. 13 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Sekolah jenjang SMP kota Batam. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penjaringan data tata kelola UKS dan ekstrakurikuler. Lebih lanjut,



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Terpetakan data tata kelola UKS di kota Batam.

7. Subkomponen (ZL) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan 100% pelaksanaan 11 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
  1. Koordinasi Terkait Update Progress SPMB pada Dinas Pendidikan Kota Batam, di Kota Batam pada tanggal 14 s.d. 15 April 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam. Output dari kegiatan ini adalah SK Penetapan Panitia SPMB Daerah dan Penyelesaian Juknis SPMB. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah menjaminan Kelancaran Proses Penerimaan, meningkatkan Akuntabilitas, memberikan Kejelasan Peran, dan menjamin Kualitas Pendidikan.
  2. Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 di Aula SMAN 2 Tanjungpinang pada tanggal 7 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Panitia SPMB Disdik Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan koordinasi Pelaksana SPMB Tahun Pelajaran 2025/2025. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Terjalin komunikasi dan koordinasi antar Instansi terkait Pelaksanaan SPMB Tahun 2025/2026.
  3. Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Batam Tahun 2025, bertempat di Aula Engku Hamidah Lt IV Kantor Walikota Batam pada tanggal 4 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Pemerintah Kota Batam, Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau, Dinas Pendidikan Kota Batam, BPMP Provinsi Kepulauan Riau, MKKS Kota Batam, Komite Sekolah. Output dari kegiatan ini adalah adanya Pakta Integritas pelaksanaan SPMB di Kota Batam yang bebas dari Pungutan Liar. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Terlaksananya SPMB di Kota Batam yang jujur transparan dan bebas dari pungutan liar.
  4. Pemantauan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang SMA Kota Tanjungpinang, di SMAN 1 Tanjungpinang dan SMAN 2 Tanjungpinang pada tanggal 13 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan SMAN 1 Tanjungpinang dan SMAN 2 Tanjungpinang. Output dari kegiatan ini adalah Laporan pelaksanaan SPMB di SMAN 1 dan 2 Tanjungpinang. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Pelaksanaan SPMB dapat berjalan sesuai dengan permendikdasmen nomor 3 tahun 2025.
  5. Rapat Pleno Penetapan Hasil SPMB Kota Batam Jenjang SD dan Monitoring Pelaksanaan Verval Pendaftaran SPMB Jenjang SMA/SMK di Kota Batam pada tanggal 18 s.d. 20 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam, Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, BPMP Provinsi Kepulauan Riau, MKKS SD Kota Batam. Output dari kegiatan ini adalah berita Acara Pleno Penetapan Hasil SPMP Jenjang SD di Kota Batam dan pendampingan kepada SMK Negeri 4 Batam dan SMA Negeri 3 Batam terkait verifikasi dokumen pendaftaran SPMB.
  6. Kegiatan Visitasi Pelaksanaan SPMB, di Kota Batam pada tanggal 23 s.d. 24 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan SD Yos sudarso. Output dari kegiatan ini adalah Laporan pelaksanaan pendampingan SPMB di kota batam. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Pelaksanaan SPMB di sekolah swasta sesuai dengan permendikdasmen nomor 3 tahun 2025.
  7. Kegiatan Visitasi Pelaksanaan SPMB Tahun 2025, di Kota Tanjungpinang pada tanggal 24 s.d. 27 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Direktorat SMP Kemendikdasmen, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Pendampingan kepada SMPN 7, SMPN 5, dan SMPN 1 terkait pelaksanaan SPMB. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Terlaksananya SPMB jenjang SMP di Kota Tanjungpinang dengan baik sesuai juknis.
  8. Pendampingan pada Kegiatan Monitoring SPMB Jenjang SMA Tahun 2025, di Kota Batam pada tanggal 26 s.d. 27 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Peningkatan pemahaman dan kepuasan publik mengenai proses seleksi SPMB di jenjang SMA di Batam. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas pelaksanaan SPMB di Kota Batam, dengan prosedur yang lebih transparan dan efisien.
  9. Rapat Pleno Hasil SPMB di Hotel Golden View Bengkong Laut, Kota Batam pada tanggal 28 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi, Pengawas,



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



- ombudsman, itwasda, BPMP Kepri, kantor cabang dinas kota batam. Output dari kegiatan ini adalah Berita acara plenopenetapan hasil SPMB jenjang SMA. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah SPMB jenjang SMA dapat berjalan dengan baik dan semua sekolah dapat terisi daya tampung sesuai ketentuan.
10. Rapat Pleno Penetapan Hasil SPMB Kota Batam Jenjang SMP Negeri Kota Batam Tahun Ajaran 2025/2026, di Ruang Rapat Raja Ali Haji Dinas Pendidikan Kota Batam pada tanggal 30 Juni s.d. 2 Juli 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam, Ombudsman, Inspektorat Daerah, BPMP Kepri, Perwakilan MKKS. Output dari kegiatan ini adalah Berita Acara Pleno Penetapan Hasil SPMP Jenjang SMP di Kota Batam. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Tanpa rapat pleno, hasil seleksi bisa saja cacat, memicu protes, dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Oleh karena itu, rapat pleno adalah fondasi terakhir yang kokoh sebelum pengumuman resmi dilakukan, memastikan bahwa setiap murid yang diterima memang layak dan sesuai dengan prosedur.
11. Rapat Pleno Penetapan Hasil SPMB Kota Batam Jenjang SMP Negeri Kota Batam Tahun Ajaran 2025/2026, di Ruang Rapat Raja Ali Haji Dinas Pendidikan Kota Batam pada tanggal 1 s.d. 2 Juli 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Koa Batam, Ombudsman, BPMP Kepri, Kepala Sekolah. Output dari kegiatan ini adalah Berita acara kelulusan SPMB jenjang SMP kota batam. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah SPMB jenjang SMP dapat berjalan dengan baik dan daya tampung terpenuhi sesuai dengan kuota.
8. Subkomponen (ZM) Wajar 13 tahun dan ATS dengan 100% pelaksanaan 10 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Pendampingan Verifikasi Validasi Penunjukan Sekolah Transformatif (Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 di Kota Batam pada tanggal 21 s.d. 24 April 2025 dengan sasaran kegiatan Pemerintah daerah se Provinsi Kepulauan riau. Output dari kegiatan ini adalah terbangunnya sekolah berasrama di Pulau Dompak, mencakup fasilitas: ruang kelas, asrama, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga; Kurikulum berbasis nasionalisme, sains, teknologi, dan karakter. Dampak dari kegiatan ini diharapkan munculnya pusat pendidikan unggulan bertaraf nasional di barat Indonesia, pemerataan kualitas pendidikan elit di luar Jawa, dan tumbuhnya SDM unggul berkarakter dan nasionalis.
  2. Peninjauan Lokasi Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, di Kota Batam pada tanggal 25 s.d. 27 April 2025 dengan sasaran kegiatan Pemerintah daerah se Provinsi Kepulauan riau. Output dari kegiatan ini adalah penetapan lokasi resmi pembangunan Sekolah Garuda, rencana pembangunan sekolah berstandar nasional di atas lahan ±20 hektare. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah tersedianya lembaga pendidikan unggulan berasrama untuk talenta nasional, terciptanya ekosistem pendidikan berbasis karakter, sains, dan teknologi.
  3. Advokasi dan Pendampingan Dalam Rangka Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah, di Kota Batam pada tanggal 19 s.d. 22 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam. Output dari kegiatan ini adalah Penyebaran materi edukasi mengenai Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah melalui berbagai media. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kesadaran orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pentingnya pendidikan prasekolah sebagai tahap awal dalam sistem pendidikan Indonesia.
  4. Advokasi dan Pendampingan Dalam Rangka Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah, di Kota Batam pada tanggal 23 s.d. 24 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam. Output dari kegiatan ini adalah Penyebaran materi edukasi mengenai Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah melalui berbagai media. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kesadaran orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pentingnya pendidikan prasekolah sebagai tahap awal dalam sistem pendidikan Indonesia.
  5. Advokasi dan Pendampingan Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah dan Revitalisasi Sekolah di Kota Batam pada tanggal 26 s.d. 27 Mei 2025 dengan sasaran



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



kegiatan Sasaran Kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun prasekolah yaitu anak usia 5-6 tahun. Output dari kegiatan ini adalah Penguatan Tata Kelola, Kebijakan Wajar 1 Tahun, data APS. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah adanya Kebijakan tentang Wajar 1 Tahun Prasekolah di Kota Batam.

6. Pendampingan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun Untuk Usia 13-15 Tahun pada Dinas Pendidikan Kota, di Kota Tanjungpinang pada tanggal 2 s.d. 5 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Output dari kegiatan ini adalah Penguatan pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun melalui penanganan Anak Tidak Sekolah. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya angka partisipasi sekolah di Kota tanjungpinang.
7. Penyelarasan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota, di Ruang Rapat Lt. III, Bappeda Gd. D, Dompak Tanjungpinang pada tanggal 11 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Bappeda, Dinas Pendidikan, BPMP Kepri. Output dari kegiatan ini adalah Berita acara pengisian aplikasi erakortek. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Perencanaan dinas pendidikan mendukung tercapainya SPM.
8. Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan ATS di Aula SMP N 4 Tanjungpinang pada tanggal 11 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Kepala Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP Negeri di Kota Tanjungpinang, Lurah se Kota Tanjungpinang, dan Operator Kelurahan se Kota Tanjungpinang. Output dari kegiatan ini adalah Tersampaiannya program wajib belajar 13 tahun, Terlaksananya pendampingan penanganan ATS melalui verval Data ATS. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya angka partisipasi sekolah di Kota Tanjungpinang.
9. Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola/Pendidikan PAUD di Aula Wan Seri Beni Gubernur Kepulauan Riau-Pulau Dompak pada tanggal 24 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Guru PAUD se Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman guru PAUD terkait 7 KAIH di satuan pendidikan. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah terimplementasinya 7 KAIH di satuan pendidikan.
10. Pendampingan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan PAUD, di Aula Wan Seri Beni Gubernur Kepulauan Riau-Pulau Dompak pada tanggal 24 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Pengelola PAUD, organisasi IGTK, IGRA, dan Himpunan PAUD. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pendampingan selama kegiatan peningkatan kapasitas pengelola PAUD, tersusunnya dokumentasi kegiatan dalam bentuk laporan, foto, dan notulensi. Peserta mendapatkan pemahaman baru. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman pengelola PAUD tentang manajemen kelembagaan, penguatan peran dalam merencanakan program yang berkualitas, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal, terjadinya jejaring dan kolaborasi antar pengelola PAUD di wilayah Kepulauan Riau, adanya motivasi pengelola PAUD untuk melakukan inovasi dan pembentahan kelembagaan di satuan masing-masing, dan tersampaiannya kebijakan dan arah strategis pemerintah terkait PAUD kepada para pengelola.

Secara keseluruhan Rekomendasi pimpinan atas Capaian Kinerja Triwulan 1 telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan:

1. Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi program Revitalisasi Sekolah melalui kegiatan Fasilitasi dan Supervisi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen dengan mengundang tim teknis Revitalisasi dari Perguruan Tinggi (UNRI) dan unsur pengawasan dari Kejati.
2. Sosialisasi dan Koordinasi SPMB mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penetapan hasil SPMB.
3. Advokasi dan Pendampingan Program Wajib Belajar 13 tahun dan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Tanjungpinang.
4. Advokasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat melalui Pelaksanaan Semarak Hardiknas tahun 2025.
5. Pendampingan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis melalui kegiatan Optimalisasi Sinergitas dan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Dukungan Pelaksanaan MBG pada Satuan Pendidikan di Kota Batam.

6. Penyampaian Kebijakan dalam Pembelajaran dan Penilaian terbaru melalui kegiatan Rapat Kerja (Raker) dan In House Training (IHT) MTsN 3 Kota Batam Tahun Pelajaran 2025/2026.
7. Pendampingan penatausahaan Dana Transfer Daerah dan Evaluasi Capaian Realisasi Dana BOS Semester I (Satu) Tahun 2025 di Kota Batam dan Kabupaten Lingga.

## Kendala/Permasalahan

1. Kendala dari kegiatan Fasilitasi dan Supervisi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen Periode Juni 2025, di Harris Hotel Batam Center adalah Beberapa narasumber tidak dapat hadir secara luring, sehingga forum diskusi kurang intens, misalnya Narasumber dari Dinas Pendidikan Natuna dan PTN (Revitalisasi). Selain itu narasumber dari Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat hadir; Seluruh peserta dari Kabupaten Natuna dan beberapa peserta dari Kabupaten Anambas tidak dapat hadir karena terkendala transportasi; dan Penyampaian materi dari Bapak Harris Iskandar dilaksanakan setelah acara penutupan oleh Wamen, sehingga peserta kurang fokus.
2. Kendala dari kegiatan Rapat Evaluasi Capaian Realisasi Dana BOS Semester I (Satu) Tahun 2025, di Auditorium SMAN 3 Batam adalah Beberapa satuan pendidikan masih belum mengetahui juknis pelaporan di ARKAS.
3. Kendala dari kegiatan BOSP Lingga adalah Beberapa satuan pendidikan masih belum memahami teknis penyesuaian RKAS sesuai petunjuk teknis pengelolaan BOSP terbaru.
4. Kendala dari kegiatan Pendampingan Tim Evaluasi ZI WBK, di Kota Batam adalah dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk evaluasi yang akurat, baik dari sisi administrasi maupun teknis.
5. Kendala dari kegiatan Workshop Tindak Lanjut Hasil Evaluasi TPI ZI/WBK Kemendikdasmen 2025, di CK Tanjungpinang Hotel & Convention Center adalah adanya beberapa kendala yang harus membutuhkan dana besar terkait pemenuhan penilaianya.
6. Kendala dari kegiatan Koordinasi Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Kemendikdasmen, di BBPMP Provinsi Jawa Tengah adalah Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan media sosial dan tantangan dalam menjaga konsistensi pesan dan kualitas konten di berbagai platform media sosial yang memiliki audiens berbeda.
7. Kendala dari kegiatan Pemantauan Implementasi dan Edukasi Gizi Program Makan Bergizi Gratis Jenjang Sekolah Dasar, di Kota Tanjungpinang adalah belum ada program edukasi gizi yang terstruktur dari satuan pendidikan.
8. Kendala dari kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang SMA Kota Tanjungpinang, di SMAN 1 Tanjungpinang dan SMAN 2 Tanjungpinang adalah sebagian orang tua masih belum memahami prosedur SPMB.
9. Kendala dari kegiatan Pendampingan pada Kegiatan Monitoring SPMB Jenjang SMA Tahun 2025, di Kota Batam adalah Potensi hambatan teknis atau logistik dalam pelaksanaan kegiatan monitoring di lokasi yang terdistribusi atau memiliki infrastruktur terbatas.
10. Kendala dari kegiatan Pendampingan Verifikasi Validasi Penunjukan Sekolah Transformatif (Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat) di Provinsi Kepri Tahun 2025 di Kota Batam adalah butuh pengawasan ketat terhadap kepatuhan RTRW jangka Panjang, risiko keterlambatan jika ada sengketa lahan atau penolakan masyarakat.
11. Kendala dari kegiatan Peninjauan Lokasi Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, di Pulaun Dompak, Tanjungpinang adalah kebutuhan pembangunan jalan akses, air bersih, jaringan listrik dan komunikasi di Pulau Dompak secara menyeluruh.
12. Kendala dari kegiatan Advokasi dan Pendampingan Dalam Rangka Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah, di Kota Batam adalah Kurangnya pemahaman orang tua tentang manfaat pendidikan prasekolah.
13. Kendala dari kegiatan Advokasi dan Pendampingan Dalam Rangka Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah, di Kota Batam adalah Kurangnya pemahaman orang tua tentang manfaat pendidikan prasekolah.
14. Kendala dari kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun Untuk Usia 13-15 Tahun pada Dinas Pendidikan Kota, di Kota Tanjungpinang adalah Dalam pelaksanaan verval data ATS baru dari satuan pendidikan, belum melibatkan operator desa/kelurahan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



## **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Tindak lanjut dari kegiatan Fasilitasi dan Supervisi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen Periode Juni 2025, di Harris Hotel Batam Center adalah Narasumber dan Peserta yang tidak dapat hadir secara luring difasilitasi dengan media daring serta penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan jika dihadiri oleh Pejabat tinggi negara.
2. Tindak lanjut dari kegiatan Rapat Evaluasi Capaian Realisasi Dana BOS Semester I (Satu) Tahun 2025, di Auditorium SMAN 3 Batam adalah BPMP melaksanakan koordinasi dengan Tim BOSP Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan penerima BOSP melalui daring, BPMP menerbitkan surat himbauan kepada Dinas Pendidikan agar dapat menyampaikan kepada satuan pendidikan penerima BOSP untuk melaporkan melalui ARKAS.
3. Tindak lanjut dari kegiatan BOSP Lingga adalah Melakukan pendampingan terkait teknis penyesuaian RKAS sesuai juknis BOSP terbaru.
4. Tindak lanjut dari kegiatan Pendampingan Tim Evaluasi ZI WBK, di Kota Batam adalah Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengumpulan dan analisis data untuk memastikan laporan evaluasi yang akurat dan tepat waktu.
5. Tindak lanjut dari kegiatan Workshop Tindak Lanjut Hasil Evaluasi TPI ZI/WBK Kemendikdasmen 2025, di CK Tanjungpinang Hotel & Convention Center adalah melanjutkan hasil yang telah tercapai dan melakukan pemenuhan pemenuhan secara bertahapatau sedikit sedikit.
6. Tindak lanjut dari kegiatan Koordinasi Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Kemendikdasmen, di BBPMP Provinsi Jawa Tengah adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas tim yang bertanggung jawab dalam pengelolaan media sosial dan Pengembangan kalender konten yang lebih terstruktur dan terukur untuk memastikan bahwa semua pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan.
7. Tindak lanjut dari kegiatan Pemantauan Implementasi dan Edukasi Gizi Program Makan Bergizi Gratis Jenjang Sekolah Dasar, di Kota Tanjungpinang adalah Pendampingan Edukasi Gizi untuk seluruh satuan pendidikan penerima manfaat MBG melalui Dinas Pendidikan.
8. Tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 di Aula SMAN 2 Tanjungpinang adalah Mendorong panitia pelaksanaan SPMB untuk menukseskan SPMB tahun pelajaran 2025-2026.
9. Tindak lanjut dari kegiatan Pendampingan pada Kegiatan Monitoring SPMB Jenjang SMA Tahun 2025, di Kota Batam adalah Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk penyelenggara SPMB dan pemerintah daerah.
10. Tindak lanjut dari kegiatan Pendampingan Verifikasi Validasi Penunjukan Sekolah Transformatif (Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat) di Provinsi Kepri Tahun 2025 di Kota Batam adalah Monitoring pembangunan oleh tim lintas kementerian secara rutin, Penggunaan teknologi pemantauan proyek secara real-time (dashboard kemajuan proyek), dan Kerja sama dengan TNI/Polri atau instansi lokal untuk dukungan logistik terpencil.
11. Tindak lanjut dari kegiatan Peninjauan Lokasi Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, di Pulaun Dompak, Tanjungpinang adalah Finalisasi Detail Engineering Design (DED) bangunan dan fasilitas, Pelaksanaan AMDAL dan kajian kelayakan lainnya, dan Pemutakhiran infrastruktur dasar secara paralel (jalan, air, listrik, internet).
12. Tindak lanjut dari kegiatan Advokasi dan Pendampingan Dalam Rangka Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah, di Kota Batam adalah Mengembangkan materi edukasi yang mudah dipahami oleh orang tua untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya pendidikan prasekolah.
13. Tindak lanjut dari kegiatan Advokasi dan Pendampingan Dalam Rangka Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah, di Kota Batam adalah Mengembangkan materi edukasi yang mudah dipahami oleh orang tua untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya pendidikan prasekolah.
14. Tindak lanjut dari kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun Untuk Usia 13-15 Tahun pada Dinas Pendidikan Kota, di Kota Tanjungpinang adalah Melakukan pendampingan pelaksanaan verval ATS kepada operator desa/kelurahan di Kota Tanjungpinang.
15. Tindak lanjut dari kegiatan Pendampingan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan PAUD, di Aula Wan Seri Beni Gubernur Kepulauan Riau-Pulau Dompak adalah Mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi kegiatan serupa di wilayahnya dan memanfaatkan media sosial instansi untuk menyebarluaskan informasi dan praktik baik dari kegiatan ini.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

**[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen  
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan**

**Progress/Kegiatan**

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung oleh KRO Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (DI.7605.QDB) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.448.549.563 (17,23%) dari pagu anggaran Rp 8.406.687.000 (termasuk pagu blokir Rp 5.278.016.000). Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM Pendidikan dengan target 57,61% masih belum dapat dihitung realisasinya, dikarenakan belum ada data yang akan dijadikan dasar perhitungan. Akan tetapi sudah dilakukan beberapa kegiatan pendukung dari RO Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya (DI.7605.QDB.750) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.448.549.563 (17,23%) dari pagu anggaran Rp 8.406.687.000 (termasuk pagu blokir Rp 5.278.016.000).

Dengan rincian kegiatan dari komponen:

1. Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data (DI.7605.QDB.750.095) melalui kegiatan sebagai berikut:
  1. Subkomponen (GD) Pendampingan Penganggaran Pemda untuk Penerapan SPM Pendidikan dengan 100% pelaksanaan 1 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Program Prioritas Kemendikdasmen di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 21 s.d. 23 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota, PMD Prov/Kab/Kota, Bapeda, BPMP. Output dari kegiatan ini adalah RTL Program Prioritas Kemdasmen. Dampak dari kegiatan ini diharapkan Pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran dan program terkait Program Prioritas di daerah masing-masing.
2. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (DI.7605.QDB.750.096) melalui kegiatan sebagai berikut:
  1. Subkomponen (ZO) Pendampingan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan dengan 100% pelaksanaan 5 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
    1. Koordinasi Program Prioritas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, di Hotel Mercure Jakarta Simatupang pada tanggal 16 s.d. 18 April 2025 dengan sasaran kegiatan Seluruh jajaran Direktur, Kepala UPT pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Program Prioritas antar UPT di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, implementasi program prioritas disetiap UPT BBPMP/BPMP, dan pelaksanaan Konsolidasi Nasional Pendidikan 2025 yang melibatkan partisipasi dari seluruh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia pada akhir bulan April 2025. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya percepatan pelaksanaan Program Prioritas sesuai dengan khazanah di masing-masing wilayah kerja UPT serta percepatan penyusunan Juknis untuk pelaksanaan masing-masing program prioritas.
    2. Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025, di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Parung, Depok, Jawa Barat pada tanggal 28 s.d. 30 April 2025 dengan sasaran kegiatan UPT dan Unit Kerja Kemendiknasmen, dan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Konsolnas 2025, partisipasi aktif UPT dan Dinas Pendidikan, dan implementasi program prioritas nasional. Dampak dari kegiatan ini diharapkan terbangunnya sinergi dan jejaring antar UPT dan dinas Pendidikan, tersusunnya strategi Percepatan pelaksanaan program prioritas Kemendikdasmen 2025-2029 serta tersusunnya rekomendasi nasional yang menjadi pedoman kerja sama pusat-daerah.
    3. Praktik Baik Pelaksanaan Penjaminan Mutu SPMI-SPME, di BPMP D.I. Yogyakarta pada tanggal 18 s.d. 19 April 2025 dengan sasaran kegiatan Seluruh pegawai BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepala, Kasubbag BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah membangun sinergi antara seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi D.I. Yogyakarta, menjaring isu permasalahan pendidikan yang terjadi di seluruh



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



wilayah kerja BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta, serta merumuskan solusi bersama antar Pemangku Kebijakan dan juga Berbagi pengalaman dan informasi terkait praktik baik pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Pemda, serta merumuskan kebijakan dan program pendidikan dasar dan menengah yang lebih terintegrasi dan berkualitas. Dampak dari kegiatan ini diharapkan terwujudnya sinergi dan strategi dalam penyelesaian isu permasalahan yang dihadapi oleh Pemda dalam merumuskan kebijakan dalam upaya penjaminan mutu pendidikan yang terintegrasi dan berkualitas di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.

4. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penjaminan Mutu, di Kota Batam pada tanggal 19 s.d. 20 April 2025 dengan sasaran kegiatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, beserta Kasi, dan Kasubbag BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah membangun sinergi antara Pemda Kota Batam dengan BPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan penjaminan mutu di Kota Batam. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan penjaminan mutu dan upaya percepatan pelaksanaan program prioritas dari pemerintah.
5. Pendampingan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan pada tanggal 23 s.d. 25 April 2025 dengan sasaran kegiatan DPRD Prov/Kab/Kota, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informasi, BAPPEDA, Disdukcapil, dan UPT Kemendikdasmen. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan kepada pemangku kepentingan di daerah untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau dan sosialisasi Program Prioritas Kemendikdasmen kepada pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan dan penjaminan mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau
2. Subkomponen (ZP) Pendampingan Pemetaan Penggunaan Rapor Pendidikan dan SPMP dengan 100% pelaksanaan 1 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Buku Profil Mutu Pendidikan pada tanggal 21 s.d. 23 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan BPMP Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Bahasa Kepulauan Riau, Kantor GTK Kepulauan Riau, dan BAN PDM Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah buku profil mutu pendidikan sebagai gambaran komprehensif tentang mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Lebih lanjut, output dari kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan secara objektif, dengan pendekatan berbasis data yang akurat dan relevan serta menjadi bahan rujukan untuk perencanaan berbasis data bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun kebijakan, program, dan intervensi prioritas. Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas rekomendasi pimpinan pada triwulan I.
3. Subkomponen (ZR) Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan dengan 100% pelaksanaan 7 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
  1. Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kota Batam Tahun 2025, di Dataran Engku Putri, Kantor Walikota Batam pada tanggal 1 s.d. 2 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam. Output dari kegiatan ini adalah pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Batam.
  2. Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, di SMAN 1 Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang pada tanggal 2 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Ketua DPRD Provinsi, Ketua TP PKK Provinsi, FORKOPIMDA, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala OPD Provinsi, Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Pendidikan, Tokoh Organisasi, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Mahasiswa dan Siswa SMA sederajat. Output dari kegiatan ini adalah pelaksanaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
  3. Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 disejalankan Halal Bihalal Bersama Bupati Bintan, di Aula Kantor Bupati Bintan pada tanggal 2 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Wakil Bupati Bintan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan, Guru, dan siswa.. Output dari kegiatan ini adalah koordinasi pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah kabupaten Bintan.
  4. Malam Anugerah Pendidikan Kota Batam di Alun-alun Engku Putri, Batam Center, Kota Batam pada tanggal 4 s.d. 5 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Walikota Batam, Dinas

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

Pendidikan Kota Batam, Satuan Pendidikan penerima penghargaan, dan pemangku Kepentingan Lainnya. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya rangkaian kegiatan Gebyar Pendidikan 2025 di Alun-Alun Engku Puteri, dan terpilihnya para pemenang dari berbagai kategori kompetisi Pendidikan, serta peningkatan visibilitas program-program pendidikan seperti subsidi SPP dan seragam gratis.. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan kebanggaan dan motivasi insan pendidikan untuk terus berprestasi dan berinovasi, terbangunnya ekosistem pendidikan yang kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, tumbuhnya budaya kompetisi yang sehat dan berorientasi pada mutu Pendidikan, penguatan posisi Batam sebagai kota dengan IPM tinggi dan fokus pada pengembangan SDM, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perhatian pemerintah dalam sektor pendidikan.

5. Audiensi Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2025/2026 dengan Dinas Pendidikan Kota Batam dan Koordinasi Tahap Lanjutan Pelaksanaan Pemeliharaan Kontraktual BPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, di Kota Batam pada tanggal 11 s.d. 13 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam, Pejabat Pengadaan BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah tersampaikannya dan terkoordinasikannya sistem penerimaan murid baru di dinas pendidikan kota batam serta koordinasi terkait persiapan pemeliharaan kontraktual di bpmp provinsi kepulauan riau. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan Kota Batam lebih memahami terkait dengan SPMB selain itu alur kerja tentang pengadaan kontraktual pemeliharaan dengan Pejabat Pengadaan yang berada di luar satker BPMP Provinsi Kepulauan Riau.

## Kendala/Permasalahan

1. Kendala dari kegiatan Pendampingan Program Prioritas Kemendikdasmen di Provinsi Kepulauan Riau, di Harris Batam Centre adalah Terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak dapat hadir dalam kegiatan.
2. Kendala dari kegiatan Koordinasi Program Prioritas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, di Hotel Mercure Jakarta Simatupang adalah Capaian dari program prioritas masih kecil di rata-rata seluruh wilayah kerja BBPMP/BPMP, Koordinasi dengan pemda terkait data pendukung dalam percepatan program prioritas masih belum terjaring seluruhnya, dan Penganggaran di daerah yang belum tercapai 20% di bidang pendidikan, sehingga perlu advokasi mendalam kepada daerah.
3. Kendala dari kegiatan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025, di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Parung, Depok, Jawa Barat adalah Tantangan sinkronisasi kebijakan kemendikdasmen dan program prioritas, PHTC, antar kementerian dan daerah, Kesenjangan akses, infrastruktur, dan te pendidikan antar wilayah, dan Tantangan sinkronisasi dan Keterbatasan koordinasi antar unit di daerah.
4. Kendala dari kegiatan Pendampingan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan, di Harper Premiere Batam adalah 6 Narasumber DPRD Kab/Kota/Prov tidak dapat menghadiri.
5. Kendala dari kegiatan Penyusunan Buku Profil Mutu Pendidikan, di Harris Batam Centre adalah Buku profil mutu pendidikan masih dalam bentuk ikhtisar / belum menjadi buku.

## Strategi/Tindak Lanjut

1. Tindak lanjut dari kegiatan Pendampingan Program Prioritas Kemendikdasmen di Provinsi Kepulauan Riau, di Harris Batam Centre adalah Persiapan kegiatan perlu lebih di matangkan lagi.
2. Tindak lanjut dari kegiatan Koordinasi Program Prioritas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, di Hotel Mercure Jakarta Simatupang adalah Koordinasi dan komunikasi bersama dengan pemerintah daerah untuk:
  1. Percepatan pelaksanaan dan capaian program prioritas
  2. Pemetaan Kendala yang dihadapi pemda, sehingga muncul solusi yang efektif dan efisien
  3. Penyelarasan penganggaran di daerah dengan program penjaminan mutu pendidikan sehingga tercipta peningkatan mutu pendidikan yang terimplementasi dengan selaras, tepat



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



sasaran, dan berkelanjutan."

3. Tindak lanjut dari kegiatan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025, di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Parung, Depok, Jawa Barat adalah:
  1. Penguatan kerjasama, komunikasi, dan koordinasi lintas sektor dan mitra pembangunan dalam kegiatan KONSOLIDASI PENDIDIKAN DAERAH
  2. Fokus pada percepatan rekomendasi dan inovasi penjaminan mutu Pendidikan
  3. Reformasi tata kelola pendidikan dengan transparansi dan akuntabilitas."
4. Tindak lanjut dari kegiatan Praktik Baik Pelaksanaan Penjaminan Mutu SPMI-SPME, di BPMP D.I. Yogyakarta adalah Melaksanakan Pemetaan kendala, Penyelarasan anggaran dalam upaya Percepatan pelaksanaan peningkatkan mutu pendidikan yang terimplementasi di Wilayah Kepulauan Riau.
5. Tindak lanjut dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penjaminan Mutu, di Kota Batam adalah Penyelesaian dari Pemetaan kendala, serta Penyelarasan anggaran dalam upaya Percepatan pelaksanaan peningkatkan mutu pendidikan yang terimplementasi di Kota Batam.
6. Tindak lanjut dari kegiatan Pendampingan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan, di Harper Premiere Batam adalah Melaksanakan evaluasi kegiatan dengan melibatkan petugas BPMP.
7. Tindak lanjut dari kegiatan Penyusunan Buku Profil Mutu Pendidikan, di Harris Batam Centre adalah Menyusun kembali bersama tim penyusun buku agar buku dapat terselesaikan.
8. Tindak lanjut dari kegiatan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kota Batam Tahun 2025, di Dataran Engku Putri, Kantor Walikota Batam adalah Pendampingan yang berkelanjutan untuk program prioritas kemendikdasmen di Pemerintah Daerah Kota Batam.
9. Tindak lanjut dari kegiatan Audiensi Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2025/2026 dengan Dinas Pendidikan Kota Batam dan Koordinasi Tahap Lanjutan Pelaksanaan Pemeliharaan Kontraktual BPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, di Kota Batam adalah Melakukan koordinasi secara instens terhadap proses dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan SPMB di kota batam dan melakukan koordinasi via aplikasi LPSE, WA, Telepon, dan Zoom
10. Tindak lanjut dari kegiatan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, di SMAN 1 Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang adalah Pendampingan yang berkelanjutan untuk program prioritas kemendikdasmen di Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
11. Tindak lanjut dari kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 disejalankan Halal Bihalal Bersama Bupati Bintan, di Aula Kantor Bupati Bintan adalah Publikasi kegiatan atas upaya apresiasi pemerintah daerah terhadap mitra pembangunan bidang pendidikan.
12. Tindak lanjut dari kegiatan Malam Anugerah Pendidikan Kota Batam di Alun-alun Engku Putri, Batam Center, Kota Batam adalah
  1. Pendampingan Pasca-Apresiasi: Dinas Pendidikan dapat menyusun program lanjutan bagi guru dan sekolah berprestasi untuk menjadi model inspiratif.
  2. Replikasi Program: Sekolah-sekolah pemenang lomba dijadikan percontohan atau studi tiru bagi sekolah lain.
  3. Sosialisasi Luas: Memperluas jangkauan informasi kegiatan serupa melalui media sosial, sekolah, dan komunitas masyarakat.
  4. Peningkatan Akses dan Kesetaraan: Menyediakan bantuan teknis dan sumber daya bagi sekolah yang kurang beruntung agar bisa bersaing dalam kegiatan ke depan.
  5. Monitoring dan Evaluasi: Menyusun laporan tahunan tentang dampak Gebyar Pendidikan terhadap peningkatan mutu dan inovasi di sekolah-sekolah di Batam.

## [SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kepulauan Riau

### [IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Riau dengan kategori sangat baik

#### Progress/Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.7606.EBA) dengan realisasi anggaran sebanyak 4.657.461.666 (42,67%) dari pagu anggaran Rp 10.916.288.000 (termasuk



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



pagu blokir Rp 350.000.000).

Capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan definisi operasional tahun diperoleh dari perhitungan 50% nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) / SMART ditambah dengan 50% nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) / OM-SPAM. Pada Bulan Juni 2025, BPMP Provinsi Kepulauan Riau belum memperoleh nilai EKA senilai 6,76 sedangkan nilai IKPA sebesar 99,70 sehingga diperoleh NKA senilai 53,23 .

Dalam upaya untuk pencapaian kinerja pada IKK 2.1 pada triwulan I BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu RO Layanan Perkantoran (WA.2005.EBA.994) dengan realisasi sebesar Rp 4.657.461.666 (44,08%) dari pagu anggaran Rp 10.566.288.000, yang terdiri dari:

1. Komponen Gaji dan Tunjangan (WA.2005.EBA.994.001) sebesar Rp 2.560.365.716 (34,13%) dari pagu anggaran Rp 4.421.469.000.
2. Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor (WA.2005.EBA.994.002) sebesar Rp 2.097.095.950 (34,13%) dari pagu anggaran Rp 6.144.819.000.

Selain itu, dalam upaya pencapaian target IKK 2.1, pada triwulan II BPMP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pimpinan pada triwulan I, yaitu melaksanakan peningkatan kapasitas SDM UPT dengan menugaskan staf dalam Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan, Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C model MOOC, kegiatan Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan III Tahun 2025, Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA.
2. Penyesuaian anggaran dan rencana penarikan dana dengan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui revisi anggaran dengan konsultasi dan koordinasi dengan Eselon I dan Kanwil DJPb. Revisi yang sudah dilakukan pada triwulan I ini antara lain:
  1. Revisi ke-4 DIPA tingkat DJA terkait Relaksasi Blokir Anggaran Efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, blokir Reguler (Kode 2) semula sebesar Rp 0,- menjadi Rp. 3.581.430.000,- dan Pagu Blokir Efisiensi Belanja (Kode A) semula sebesar Rp 10.052.516.000,- menjadi 2.046.586.000,- Sehingga total blokir senilai Rp 5.628.016.000,- dengan pagu anggaran tetap,
  2. Revisi ke-5 DIPA tingkat Kanwil pergeseran belanja barang untuk belanja operasional, Revisi Hal 3 DIPA.
  3. Mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu dengan berkoordinasi dengan KPPN Tanjungpinang,
  4. Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka pencairan Belanja Pegawai dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.

## Kendala/Permasalahan

Nilai EKA belum maksimal. Komponen nilai EKA terdiri dari CRO (75%), Penggunaan SBK (10%), dan Efisiensi SBK (15%). Pada bulan Juni 2025 baru diperoleh nilai CRO senilai 9,01 dan komponen lain masih 0, hal ini terjadi karena Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi.

## Strategi/Tindak Lanjut

Menunggu pembaharuan dari aplikasi smart DJA ([monev.kemenkeu.go.id](http://monev.kemenkeu.go.id)) dalam penyelesaian pemetaan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## [SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kepulauan Riau

### [IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kepulauan Riau minimal A

#### Progress/Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.7606.EBA) dengan realisasi anggaran sebanyak 4.657.461.666 (42,67%) dari pagu anggaran Rp 10.916.288.000 (termasuk pagu blokir Rp 350.000.000).

Capaian kinerja Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan target kinerja A akan diperoleh hasil pada triwulan IV. Akan tetapi dalam upaya untuk pencapaian target kinerja pada IKK 2.2 pada triwulan II BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung dari:

1. RO Penyusunan Laporan BMN (WA.7606.EBA.956) dengan realisasi dari komponen Penyusunan Dokumen Layanan BMN (WA.7606.EBA.956.059) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0 (0%) dari pagu anggaran Rp 10.000.000 (termasuk pagu blokir Rp 10.000.000).
  
1. RO Layanan Umum (WA.7606.EBA.962) dengan realisasi dari komponen Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan (WA.7606.EBA.962.062) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0 (0%) dari pagu anggaran Rp 340.000.000 (termasuk pagu blokir Rp 340.000.000), melalui kegiatan:
  1. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM UPT dalam mendukung tata kelola yang bersih, dan inovatif berdasarkan rekomendasi pimpinan pada evaluasi kinerja triwulan I, antara lain:
    1. Pelatihan Teknis Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Kerja (K3L) di Lingkungan Kemendikdasmen, di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Parung, Depok, Jawa Barat pada tanggal 14 Juni 2025, 23 Mei 2025, 20 Juni 2025, 5 Juli 2025, dan 13 s.d. 19 Juli 2025 dengan sasaran kegiatan ASN Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis Kemendikdasmen. Output dari kegiatan ini adalah Mengetahui keterampilan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja, dan mengimplementasikan dan mengelola penerapan K3. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Tersampaikannya konsep dasar K3L, program dan sistem manajemen K3, komunikasi dan dokumentasi K3.
    2. Pelatihan Teknis Manajemen Risiko bagi Pegawai di Lingkungan Kemendikdasmen, di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Parung, Depok, Jawa Barat pada tanggal 14 Juni 2025, 20 Juni 2025, 23 Mei 2025, dan 5 Juli 2025 dengan sasaran kegiatan Pegawai BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Pegawai memahami proses manajemen risiko dalam penyusunan peta risiko. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah terusunnya peta risiko instansi.
    3. Pelatihan Teknis Pelayanan Publik, di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Parung, Depok, Jawa Barat pada tanggal 5 July 2025 dan 13 s.d. 19 Juli 2025 dengan sasaran kegiatan Pegawai BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan layanan publik. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik di BPMP Provinsi Kepulauan Riau.
    4. Pelatihan Teknis Dasar-dasar Kearsipan Angkatan I di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di PPNSDM Kemendikdasmen pada tanggal 13 s.d. 19 Juli 2025 dengan sasaran kegiatan Pegawai Kemendikdasmen. Output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman terkait dasar kearsipan. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Meningkatnya kompetensi pegawai kemendikdasmen terkait dasar kearsipan.

2. Rapat Koordinasi Perpustakaan di Lingkungan Kemendikdasmen Tahun 2025, di PPSDM Kemendikdasmen pada tanggal 14 s.d. 16 Juli 2025 dengan sasaran kegiatan Pengelola Perpustakaan Kemendikdasmen. Output dari kegiatan ini adalah Peserta mendapatkan pemahaman baru terkait Standar Nasional Perpustakaan, Dan Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi, Pengelolaan Perpustakaan Dan Jf Bidang Perpustakaan Di Kemendikdasmen, Serah Simpan KCKR, Rekomendasi hasil rakor, dan Tersusunnya dokumentasi kegiatan dalam bentuk laporan, foto, dan notulensi. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Seluruh karya/produk buku/digital yang dihasilkan oleh unit kerja diunggah ke laman repository.
3. Pengurusan Pajak STNK Kendaraan Dinas BPMP Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14 Juni 2025. Output dari kegiatan ini adalah Terbayarnya pajak tahunan kendaraan dinas milik BPMP Provinsi Kepri tepat waktu, Dokumen kendaraan (STNK dan bukti bayar pajak) telah diperbarui dan sah secara hukum, Berkurangnya risiko denda administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, dan Tersedianya kendaraan operasional yang legal dan siap digunakan untuk mendukung kegiatan kedinasan. Lebih lanjut diharapkan dapat menjaga kelayakan administrasi seluruh kendaraan dinas, termasuk perpanjangan STNK dan validitas dokumen kendaraan, dan Tersedianya kendaraan dinas yang siap digunakan, tanpa hambatan legal dalam menjalankan tugas kedinasan
4. Koordinasi Dharma Wanita Persatuan Dalam Pengembangan Program Kerja, di Kota Batam pada tanggal 25 s.d. 27 April 2025 dengan sasaran kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Batam. Output dari kegiatan ini adalah Pengembangan Program Kerja. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana program kerja yang bisa di laksanakan di Kepulauan Riau.
5. Pendampingan Kegiatan Seleksi Kompetensi Menggunakan CAT dalam Rangka Penerimaan PPPK Kemendikbudristek Tahun 2024 Periode II, di Golden View Hotel Batam pada tanggal 4 s.d. 6 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Calon PPPK Tahap 2 dari BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Melaksanakan Pendampingan Kegiatan Seleksi Kompetensi Menggunakan CAT dalam Rangka Penerimaan PPPK Kemendikbudristek. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Seleksi Kompetensi Menggunakan CAT dalam Rangka Penerimaan PPPK Kemendikbudristek.
6. Seleksi Kompetensi Menggunakan CAT Dalam Rangka Penerimaan PPPK Kemendikbudristek Tahun 2024 Periode II, di Golden View Hotel Batam pada tanggal 4 s.d. 5 Mei 2025 dengan sasaran kegiatan Pegawai BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK secara CAT di Batam. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan tenaga PPPK yang kompeten dan transparan.
7. Menerima Penghargaan Mendikdasmen, di Plaza Insan Pendidikan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara (Gedung A) Lantai 1, Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta pada tanggal 2 s.d. 4 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Satker Kemendikdasmen yang mendapatkan Penghargaan Anugerah Mendikdasmen. Output dari kegiatan ini adalah Diperolehnya penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori Informatif dari Mendikdasmen sebagai bentuk pengakuan terhadap komitmen BPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam penyediaan informasi publik secara transparan dan akuntabel.. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Terlaksananya tata kelola BPMP Provinsi Kepulauan Riau yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi publik dalam setiap aspek pelayanan dan pelaksanaan program..
8. Puncak Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, di Hotel Aston Tanjungpinang pada tanggal 4 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Terpilihnya Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya mutu pendidikan di Kepulauan Riau melalui penanaman nilai bahasa .
9. Pemberdayaan dan Pengembangan Kepengurusan Program DWP Tahun 2025 dan Pendampingan Pengembangan Usaha Mikro, di BBPMP Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 s.d. 28 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan DWP BPMP Kepri dan DWP BPMP Jateng. Output dari kegiatan ini adalah Mempelajari tentang pengembangan Usaha Mikro yang ada di Jawa Tengah. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Pengembangan Program DWP BPMP Kepulauan Riau .
10. Kunjungan Kerja Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta, di Kota Batam pada tanggal 23 s.d. 24 Juni 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam, BPMP Kepri, dan Satuan Pendidikan. Output dari kegiatan ini adalah Melakukan Evaluasi dan Penguatan Manajemen Talenta di Lingkungan Dasmen di Kota Batam, Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas SDM melalui Program-



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

program Strategis, dan Mempererat Sinergi antara Kemendikdasmen dgn pemda dan institusi pendidikan kota Batam. Lebih lanjut, diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah Keberlanjutan Program Manajemen Talenta dan Implementasi Hasil Kunjungan.

Selain itu, dalam upaya pencapaian target IKK 2.2 sesuai PK 2024 yang nilainya akan diperoleh pada triwulan ke IV, pada triwulan II BPMP Provinsi Kepulauan Riau melaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pimpinan pada triwulan I, yaitu melaksanakan peningkatan kapasitas SDM UPT dengan menugaskan staf dalam Pelatihan Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pelatihan Manajemen Resiko, dll.
2. Melakukan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE) SAKIP TA 2024;
3. Melakukan pemantauan nilai IKPA melalui omspan;
4. Menyusun Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Penutup (Likuidasi) BPMP Provinsi Kepulauan Riau TA 2024 dengan kode satker (419511);
5. Melakukan perbaikan menyeluruh di lembaga (baik infrastruktur maupun administratif) terkait persiapan penilaian ZI WBK;
6. Melakukan Revisi anggaran dengan tidak mengubah target kinerja;
7. Update Informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan di laman resmi BPMP Provinsi Kepulauan Riau (<https://bpmpKepulauan Riau.kemdikbud.go.id/>) dan Medsoc BPMP Provinsi Kepulauan Riau (Facebook : Lpmp Kepulauan Riau dan instagram : bpmp\_kepulauan\_riau)

### **Kendala/Permasalahan**

1. Kendala dari kegiatan Rapat Koordinasi Perpustakaan di Lingkungan Kemendikdasmen Tahun 2025, di PPSDM Kemendikdasmen adalah Akun repository yang belum ada untuk BPMP Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kendala dari kegiatan Seleksi Kompetensi Menggunakan CAT Dalam Rangka Penerimaan PPPK Kemendikbudristek Tahun 2024 Periode II, di Golden View Hotel Batam adalah Kendala teknis sistem CAT dan kesiapan peserta.
3. Hingga triwulan II dokumen Perencanaan, seperti Dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dll. Belum dapat disusun karena Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih dalam proses penyusunan.

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Tindak lanjut dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 Ditjen PAUD Dasmen, di Ra Suites Simatupang, Jakarta adalah menyesuaikan strategi penjaminan mutu serta metode pelaksanaan.
2. Berkoordinasi dengan eselon I dan Biro Perencanaan Kemendikdasmen dalam upaya persiapan penilaian mandiri SAKIP (dalam kondisi Rencana Strategis Kementerian belum tersedia).

### **C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7605.QDB.750] Satuan PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	781	1041	Rp4.971.402.000	Rp2.045.687.857	41.15
2	[WA.7606.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
3	[WA.7606.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp340.000.000	Rp0	0.00
4	[WA.7606.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp10.566.288.000	Rp6.686.825.879	63.28
<b>Total Anggaran</b>				<b>Rp15.887.690.000</b>	<b>Rp8.732.513.736</b>	<b>54.96</b>	

#### D. Rekomendasi Pimpinan

- Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran dengan target 64,06% dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain:
  - Penguatan kolaborasi dengan mitra eksternal, seperti kejaksaan dan BPK pada pelaksanaan program Revitalisasi Sekolah;
  - Penyusunan Laporan SPMB
  - Advokasi dan Pendampingan Program Wajib Belajar 13 tahun dan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
  - Advokasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
  - Perlu melakukan evaluasi dampak proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis
  - Penyampaian Kebijakan dalam Pembelajaran dan Penilaian terbaru
  - Perlu dilakukan pendampingan Dana Transfer Daerah terkait cut off Data Dapodik untuk pengusulan dana BOSPA TA 2026
- Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM Pendidikan dengan target 57,61% dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Pendamping Satuan Pendidikan Terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal di Satuan Pendidikan.
- Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Riau dengan kategori sangat baik dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain dengan terus berkoordinasi dengan Kanwil DJPB Tanjungpinang dan KPPN Tanjungpinang.
- Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kepulauan Riau minimal A dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain:
  - Melakukan evaluasi secara berkala agar capaian terus meningkat
  - Dorongan peningkatan kapasitas UPT dalam mendukung tata kelola yang bersih, dan inovatif melalui program magang.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



Bintan, 28 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai Penjaminan Mutu  
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Warsita



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**